

SKRIPSI

**ANALISIS KETEPATAN DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL (PKH)
KABUPATEN MAJENE KECAMATAN BANGGAE TIMUR**



MUNIR

F0116314

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan Kemiskinan dan Pendidikan masih menjadi persoalan bangsa Indonesia yang hingga saat ini sulit untuk diselesaikan. Dari masa kemerdekaan hingga sekarang, solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini masih juga belum ditemukan. Oleh karena hal tersebut, pemerintah selalu menjadikan dua topik ini sebagai prioritas untuk segera dicari jalan keluarnya. Luasnya wilayah dan pembangunan sarana dan prasarana pendukung yang tidak merata menjadi faktor utama permasalahan kemiskinan dan pendidikan di Indonesia sulit untuk diselesaikan.

Penyebab kemiskinan di Indonesia juga bermacam-macam mulai dari Laju Pertumbuhan Penduduk yang terus meningkat, banyaknya penduduk usia produktif yang tidak bekerja, kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran dan distribusi pendapatan yang berbeda antara satu daerah dan lainnya. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga bulan maret 2018 mencapai 25,95 juta jiwa (9,82 persen).

Selain masalah kemiskinan yang masih belum bisa terselesaikan, pemerintah Indonesia juga belum bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih belum bisa dikatakan baik. Pemerintah cenderung bersikap acuh tak acuh dan berdalih bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih baik dibuktikan dengan banyaknya pelajar Indonesia yang mampu meraih prestasi dalam perlombaan tingkat Nasional maupun Internasional. Sebenarnya hal ini tidaklah salah, melainkan Pemerintah perlu memperhatikan adanya pemerataan pendidikan diseluruh wilayah Indonesia. Karena berdasarkan data yang dirilis Oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah pelajar Indonesia yang putus sekolah masih sangat tinggi.

Untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan dan pendidikan di Indonesia, pemerintah mengadakan berbagai program yang berlaku secara nasional. Diharapkan dengan adanya program-program tersebut dapat mempercepat pembangunan baik fisik maupun non fisik. Pembangunan tersebut ditujukan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata sesuai yang diamanatkan pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV.

Pencapaian kesejahteraan masyarakat dilalui dengan jalan perubahan-perubahan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, perubahan-perubahan tersebut dilakukan melalui pembangunan, tujuan pembangunan masyarakat ialah perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat, sehingga kemiskinan dan lingkungan masyarakat mengalami perubahan. Kemiskinan hampir menjadi permasalahan di semua negara, baik di negara maju maupun di negara sedang berkembang dengan tingkat permasalahan yang berbeda-beda.

Di Indonesia sebagai salah satu negara sedang berkembang, kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang penting dan sangat serius karena kemiskinan membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti: sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Tujuan pemerintah negara salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat termaktub dalam Konstitusi UUD 1945. Rancangan program keluarga harapan oleh pemerintah pusat merupakan bagian untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia mulai pusat maupun Daerah Provinsi Kabupaten Kota.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 sampai saat ini tahun 2020 melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program keluarga harapan diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan. Dasar Hukum, UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang

Kesejahteraan Lansia, UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial.

Peserta PKH memiliki berbagai tanggung jawab yang harus dipenuhi terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Pemeriksaan kebidanan pada ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, dan asupan gizi balita merupakan kewajiban di bidang kesehatan. Dari segi pendidikan, peserta PKH bertanggung jawab menyekolahkan anaknya ke sekolah dasar dan menengah. Program PKH akan memiliki keuntungan jangka pendek dan jangka panjang.

Dalam jangka pendek, PKH akan meningkatkan RTSM/pendapatan KSM melalui penurunan pengeluaran rumah tangga. Inisiatif ini diharapkan dapat memutus siklus kemiskinan antargenerasi dalam jangka panjang dengan meningkatkan kualitas kesehatan/gizi, pendidikan, dan kemampuan pendapatan anak di masa depan (price effect) bagi anak-anak dari keluarga miskin. Kenyataannya, teori yang ada menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan rumah tangga berbanding terbalik dengan derajat kesehatan dan pendidikannya. Karena pendapatan mereka yang rendah, keluarga yang sangat miskin bahkan tidak dapat memenuhi tuntutan kesehatan dan pendidikan mereka yang paling dasar.”

Manfaat PKH untuk jangka pendek yaitu melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga, sedangkan manfaat PKH untuk jangka panjang memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak dimasa depan dari anak keluarga miskin, serta memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya.

Dana yang diberikan kepada RTSM secara tunai melalui Kantor Pos dimaksudkan agar penerima dapat mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan yakni anak-anak harus bersekolah hingga SMP, anak balita

harus mendapatkan imunisasi dan ibu hamil harus memeriksakan kandungan secara rutin. Program ini memberikan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan catatan mengikuti persyaratan yang diwajibkan. Persyaratan itu berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu kesehatan dan pendidikan. Jika kesehatan terjamin maka pendidikan seseorang akan berjalan dengan baik, dengan kualitas pendidikan yang layak dan bagus maka secara otomatis kualitas sumber daya manusia juga akan meningkat. Sasaran dari program PKH yakni ibu hamil, ibu menyusui, memiliki anak balita dan anak usia sekolah setingkat SD-SMP. Penerima bantuan yaitu ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan. Jadi, pada kartu kepesertaan PKH pun akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak bukan kepala rumah tangga (Syamsir, 2014).

Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun serta upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin. Jenis lembaga pendidikan dasar yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak penerima bantuan PKH terdiri dari Lembaga Pendidikan Formal (SD, SMP) dan Lembaga Pendidikan Non-Formal. Lembaga pendidikan tersebut berperan untuk mensukseskan pencapaian tujuan PKH pendidikan karena salah satu tujuan akhir PKH adalah meningkatkan angka partisipasi sekolah anak bagi anak-anak RTSM serta untuk mengurangi pekerja dibawah umur di Indonesia.

Program ini memiliki keunikan dalam menetapkan siapa yang menerima manfaat atau program dan sampai berapa lama penerima manfaat memperoleh bantuan. Bila hasil evaluasi menyebutkan bahwa penerima program telah memenuhi tujuan PKH, maka RTSM dikeluarkan sebagai penerima PKH. Sebaliknya, bila RTSM penerima manfaat masih menerima PKH hanya dibatasi maksimal 6 tahun.

Kabupaten Majene adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi barat yang dibentuk pada tanggal 15 Agustus 1955

berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 1959. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Majene cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di Kabupaten Majene masih banyak terdapat masyarakat miskin yang terutama bertempat tinggal di daerah pelosok, salah satu daerah tersebut berada di Kecamatan Banggae timur.

Kecamatan Banggae timur adalah salah satu kecamatan yang mendapatkan pusat perhatian pemerintah melalui program bantuan keluarga harapan (PKH), namun berdasarkan observasi awal yg dilakukan oleh penulis terdapat beberapa permasalahan sangat substansial yang perlu di evaluasi oleh pemerintah terkait ketepatan sasaran penyaluran bantuan keluarga harapan tersebut agar tidak menimbulkan masalah baru di ruang masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Analisis Ketepatan Data Penerima Bantuan Sosial (Pkh) Kabupaten Majene Kecamatan Banggae Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dituliskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah data penerima bantuan social *“PROGRAM KELUARGA HARAPAN” (PKH)* Kec. Banggae Timur sudah tepat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui sejauh mana ketepatan data penerima bantuan social *“PROGRAM KELUARGA HARAPAN” (PKH)* Kec. Banggae Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis yakni sangat diharapkan mendapatkan sebuah hasil yang berguna bagi seluruh kalangan

dimanapun dan menjadi sebuah alat informasi yang mempermudah untuk mendapatkan pengetahuan tentang ketepatan data penerima bantuan social (PKH) terutama bagi penulis sejauh mana mampu memahami dan mendalami disiplin ilmu sebagai salah satu mahasiswa prodi ilmu politik yang didapatkan selama proses masa perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis Agar dapat menambah sumber pengetahuan penulis sebagai hasil dari apa yang telah didapatkan baik dilingkungan kampus maupun didalam perkuliahan, selain itu hasil penelitian ini bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang.
- b. Bagi Masyarakat Masyarakat yang ada diseluruh di Kabupaten Majene, agar dapat mengetahui dan memahami lebih mendalam tentang Ketepatan data PKH di Kabupaten Majene, Kecamatan Banggae Timur, Kelurahan Lembang Dhua.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada Bab I Pendahuluan, berisi terkait penjelasan atau ulasan awal terkait permasalahan yang peneliti akan teliti. Pada Bab ini juga berisi terkait batasan permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Pada Bab II Tinjauan Pustaka, berisikan terkait materi seputar hal yang akan diteliti. Dalam hal ini, Program Keluarga Harapan (PKH), Penelitian Terdahulu, Teori Evaluasi Program, Kerangka Pikir, Data Penerima PKH, Indikator pelaksanaan PKH, dan Evaluasi CIPP.

Pada Bab III Metode Penelitian, berisikan tipe penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data

Pada Bab IV Hasil Penelitian, hasil penelitian ini berisikan

gambaran umum lokasi penelitian, dan data-data yang ditemukan peneliti di lapangan dan analisis peneliti sebagaimana metode penelitian yang digunakan peneliti.

Pada Bab V Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran dari penelitian yang dilakukan peneliti dimana kesimpulan bersumber dari teori yang digunakan peneliti terhadap permasalahan yang peneliti teliti. Sedangkan, Saran merupakan hal yang peneliti usulkan terkait masalah yang ditemukan dilapangan dengan harapan dapat menjadi rujukan oleh pihak yang berwenang untuk memperbaiki lagi Program Keluarga Harapan (PKH).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Program keluarga harapan (PKH)

Program PKH dapat diartikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Dengan demikian yang perlu ditekankan bahwa program PKH terdapat 3 unsur penting yaitu sebagai berikut:

1. Program keluarga harapan adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan.
2. Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan.
3. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Dalam setiap pogram tentu ada kebijakan dan Evaluasi terkhususnya program PKH, evaluasi program PKH menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi. Sedangkan Cronbach dan Stufflebeam menjelaskan evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Suharsmi Arikunto (2014).

Evaluasi program keluarga harapan (PKH) adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standard tertentu yang telah dibakukan.” Dari berbagai definisi tersebut di atas, dapat diintisarikan bahwa yang dimaksud

dengan evaluasi program keluarga harapan (PKH) adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu program pemerintah, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

Menurut Gaspersz, ada beberapa aspek yang diperlukan dalam mengukur mutu pelayanan suatu jasa, diantaranya adalah *evaluasi terus-menerus*. Evaluasi terus-menerus yang didasarkan pada (*feedback*) meruakan elemen penting untu perbaikan terus-menurus dalam rangka mengembangkan manajemen kualitas. Mekanisme umpan-balik (*feedback*) bersifat sederhana secara lisan atau laporan (waktu menggunakan system informasi kualitas atau jumlah yang kompleks terintegrasi dengan baik). Faktor kunci yang perlu diperhatikan dalam memberikan umpan balik adalah informasi harus tepat waktu kepada penerima informasi sehingga memungkinkan untuk melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang terjadi.

Dari pernyataan yang dikemukakan bahwa dapat disimpulkan perihal mutu pelayanan dalam suatu program diperlukan umpan balik dari penerima program sebagai wujud dari evaluasi yang dilakukan secara *continue* agar dapat memperoleh hasil yang maksimal.

Upaya untuk menjaga mutu pelayanan adalah program menjaga mutu (*quality assurance program*). Batasan program menjaga mutu ini banyak macamnya. Menurut Mattos dan Keller, suatu upaya yang berrkesinambungan, sistematis dan objektif dalam memantau dan menilai pelayanan yang diselenggarakan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan, serta menyelesaikan masalah yang ditemukan untuk memperbaiki mutu pelayanan.

Sebagaimana dijelaskan diawal bahwa perihal menjaga mutu pelayanan atau suatu program ada berbagai Batasan yang dikenal. Beberapa di antaranya yang dipandang cukup penting adalah:

- 1) Mutu adalah tingkat kesempurnaan dari penampilan sesuatu yang sedang diamati (*Winston Dictionary*)
- 2) Mutu adalah sifat yang dimiliki oleh suatu program (*Doabedian*)
- 3) Mutu adalah totalitas dari wujud serta ciri dari suatu barang atau jasa, yang di dalamnya terkandung sekaligus pengertian rasa aman atau pemenuhan para pengguna (*Din ISO*)
- 4) Mutu adalah kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan (*Crosby*)

Sebagai suatu program yang ada dalam hal peningkatan taraf hidup atau menjadi stimulasi untuk membantu masyarakat ekonomi kelas bawah. Maka, “*Program Keluarga Harapan*” harus dapat diukur mutu pelayanannya. Sehubungan dengan apa yang disinggung sebelumnya melalui penyampaian Gaspersz yakni, evaluasi terus-menerus.

Studi evaluasi hingga saat ini masih menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam melihat keberhasilan suatu program ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah. Dari segi historis evaluasi merupakan alat dari berbagai cabang ilmu pengetahuan untuk menganalisis dan menilai fenomena ilmu pengetahuan dan aplikasi ilmu pengetahuan dalam penerapannya. Karena itu ilmu evaluasi berada di berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti ilmu-ilmu sosial, ilmu ekonomi, bisnis, manajemen, pendidikan, ilmu politik, sosiologi dan sebagainya. Evaluasi juga merupakan alat ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan lainnya. Demikian juga evaluasi merupakan alat teknologi. Dengan kata lain evaluasi merupakan alat ukur yang ada kaitannya dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Sejarah evaluasi dimulai di Tiongkok (Cina) pada Tahun 2000 SM. Evaluasi

dipergunakan untuk mengevaluasi para pegawai kerajaan. Dalam perkembangannya kemudian evaluasi juga sebagai bagian dari kegiatan penelitian. Sebagai cabang ilmu penelitian, evaluasi memerlukan teori evaluasi sendiri dan teori ilmu-ilmu sosial sebagai bagian dari objek evaluasi. Sekalipun kemudian dalam perkembangannya para teoritis evaluasi kemudian berbeda pendapat mengenai penggunaan teori evaluasi dan teori ilmu sosial. Sebagian menganggap bahwa studi evaluasi sangat membutuhkan teori namun sebagian lain beranggapan bahwa evaluator tidak membutuhkan teori dalam melakukan evaluasi.

Teori evaluasi dan teori ilmu sosial mempunyai pengaruh penting terhadap evaluasi program modern. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Shadish dalam pidatonya yang berjudul "*Evaluation Theory is Who We Are*", menyatakan bahwa semua evaluator harus mengetahui teori evaluasi sebab teori adalah sentral untuk identitas profesional para peneliti. Teori evaluasi merupakan inti dari pada identitas peneliti itu sendiri. Setiap profesi memerlukan dasar pengetahuan yang unik, dan bagi para evaluator teori evaluasi merupakan ilmu pengetahuan itu. Pendapat ini kemudian juga didukung oleh beberapa pakar lainnya yang menganggap begitu pentingnya teori digunakan dalam studi evaluasi (Alkin; Chen; Donaldson; Fetterman; Lipsey; Mark; Rossi; Freeman; Shadish; Cooc; Campbell dan Weiss,2006).

Adapun untuk sebagian pakar yang menyatakan bahwa studi evaluasi tidak memerlukan teori evaluasi. Sebagaimana yang diungkap oleh Michael Scriven menyatakan bahwa evaluasi tidak membutuhkan teori. Scriven menyatakan bahwa evaluator mungkin melakukan evaluasi program dengan baik tanpa mempergunakan teori evaluasi atau teori program, (Wirawan,2012:31-32).

Ditinjau dari segi tujuan studi evaluasi bahwa tujuan evaluasi adalah mengumpulkan informasi untuk menentukan nilai dan manfaat objek evaluasi, mengontrol, memperbaiki, dan mengambil keputusan

menganai objek tersebut. Beberapa pakar lebih terperinci menjelaskan tujuan dari evaluasi yakni evaluasi untuk mengukur pengaruh program terhadap masyarakat; menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; mengukur apakah pelaksanaan program, sesuai dengan standar; untuk mengidentifikasi mana dimensi yang berjalan dan mana yang tidak berjalan; apakah memenuhi ketentuan undang-undang; mengukur cost effectiveness dan cost efficiency; mengambil keputusan mengenai program; memberikan feed back bagi pimpinan dan staff dan mengembangkan teori ilmu evaluasi atau riset evaluasi (Dunn : 2000, Weiss : 1998, Shadish : 1998. Posvavac dan Carey: 1997 Soetari: 2014, Wirawan: 2012).

Kebijakan merupakan hal yang identik dengan masalah organisasi, organisasi yang dimaksud meliputi organisasi pemerintah secara umum, maupun yang ada dalam pemerintah serta organisasi non pemerintah atau organisasi sektor swasta. Sebagai suatu dimensi yang ada dalam bidang administrasi publik kebijakan mempunyai peran yang penting dalam menentukan hal-hal apa yang harus diberikan kepada publik dalam hal penentuan suatu formulasi dalam rangka pemecahan sesuatu yang dianggap menjadi kesenjangan publik.

Dimensi kebijakan berkenaan dengan dengan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan. Dimensi kebijakan dianalogikan dengan pekerjaan otak yang selalu memutuskan apa yang hendak dikerjakan oleh sistem organ tubuh atau dimensi struktur organisasi melalui suatu energi atau sistem penggerak dan kendali atau dimensi manajemen. Dalam kenyataan, untuk memproses sebuah keputusan yang benar dibutuhkan serangkaian prinsip yang secara umum dibedakan atas prinsip rasionalitas dan politis.

Output dari proses tersebut dapat berupa keputusan tentang alternatif terbaik yang siap untuk diimplementasikan. Akan tetapi, sampai sejauh mana prinsip-prinsip pilihan terbaik ini digunakan dalam proses pembuatan keputusan, merupakan isu penting yang terkesan

kurang diberi perhatian yang memadai selama ini. Dimensi kebijakan ini memang Sebelum membahas mengenai kebijakan lebih luas penulis akan memberikan mengenai apa sebenarnya definisi kebijakan itu sendiri. Istilah kebijakan berbeda kebijaksanaan, kebijakan lebih menunjukkan adanya serangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, sedangkan kebijaksanaan berkenaan dengan suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang, atau sebaliknya, berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat, dan sebagainya. penting mengingat kedudukannya sebagai penentu tentang apa yang hendak dikerjakan. Kebijakan seperti yang didefinisikan oleh Graycar dapat dipandang dari perspektif filosofis, produk, proses, dan kerangka kerja. (Keban,2008).

Sebagai suatu konsep “filosofis”, kebijakan dipandang sebagai serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan. Sebagai suatu “produk”, kebijakan diartikan sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, sebagai suatu “proses”, kebijakan menunjuk pada cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu “kerangka kerja”, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode dimplementasinya.

Setelah mengetahui istilah kebijakan ataupun kebijakan publik bahwa pada dasarnya baik itu kebijakan maupun kebijakan publik adalah suatu hal yang menggambarkan bagaimana lahirnya suatu keputusan-keputusan yang memiliki nilai maupun prinsip yang diwujudkan dalam bentuk aturan yang dapat dikatakan mengikat dalam rangka pencapaian ekspektasi atau harapan-harapan masyarakat. Berbicara tentang kebijakan maupun kebijakan publik di Negara kita Indonesia sudah lahir berbagai macam kebijakan baik itu kebijakan yang sifatnya internal pemerintah maupun kebijakan external yang

secara langsung berhubungan dengan publik atau masyarakat. Dari berbagai macam kebijakan pemerintah yang ada yang telah dikeluarkan oleh pemerintah khususnya pada sektor publik, kebijakan pemerintah dalam pemberian.

Program Keluarga Harapan atau yang lebih tren dengan kebijakan PKH adalah salah satunya. Kebijakan PKH adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui instruksi Presiden NO.3 Tahun 2008. Kebijakan PKH lahir sebagai manifestasi dari impact kenaikan bahan bakar minyak (BBM), yang merupakan pengurangan subsidi BBM itu sendiri. Dalam perkembangannya sendiri bahwa PKH merupakan pemberian dalam bentuk uang tunai kepada masyarakat yang mana bagi mereka yang mendapatkan adalah khusus bagi rumah tangga sangat miskin, yang miskin dan hampir miskin. Besarannya ialah uang tunai Rp.2.000.000 per bulan, yang dibagikan setiap pertriwulannya atau per tiga bulannya.

Secara konseptual, Program Keluarga Harapan (PKH) bersifat sebagai bantuan darurat. Bantuan ini hampir sama seperti bantuan tanggap darurat yang diberikan kepada korban bencana alam atau korban bencana sosial, yaitu bantuan yang diberikan untuk penanggulangan pertama terhadap kondisi kehidupan masyarakat yang mengalami kehilangan atau musibah. Selanjutnya akan dirumuskan dan ditetapkan lagi program-program, kegiatan dan jenis bantuan yang bertujuan untuk memulihkan kondisi kehidupan masyarakat tersebut. Selain sifatnya yang merupakan bantuan darurat, PKH juga merupakan bantuan antara pada masa transisi, yaitu bantuan yang bertujuan untuk menjaga kestabilan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat pada saat kondisi perekonomian negara sedang mengalami perubahan atau pembenahan. PKH bukan merupakan satu-satunya jenis bantuan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah perekonomian masyarakat dan negara.

Penyusunan rencana program dan pemberian bantuan untuk

memulihkan dan meningkatkan kondisi tersebut. mereka dapat survive.

Mereka beralasan bahwa dana tersebut ialah barang yang membutuhkan proses, baik dalam persiapan maupun dalam pelaksanaannya. Disisi lain, sebagian yang kontra atau yang kurang mendukung kebijakan ini menganggap bahwa kebijakan ini tidak mendidik masyarakat khususnya masyarakat miskin kita untuk bagaimana berusaha sehingga kemudian habis dan juga sangat tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat miskin setiap bulannya.

Beberapa unsur DPR menilai bahwa PKH merupakan jenis bantuan konsumtif dan habis pakai. Bantuan ini dipandang tidak akan memberikan daya ungkit terhadap kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan bahkan cenderung akan membuat masyarakat menjadi ketergantungan. DPR juga menilai bahwa pemberian bantuan perlu diujicobakan terlebih dahulu sebelum ditetapkan kebijakannya untuk seluruh daerah di Indonesia. Dari beberapa pendapat ini maka penulis tertarik untuk mendapatkan lebih dalam mengenai kebijakan PKH ini, dimana penulis akan mencoba melihat apakah kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah ini efektif dalam pelaksanaannya.

Olehnya itu penulis akan mencoba melihatnya dari segi komponen-komponen kebijakan yakni bagaimana proses formulasinya, implementasi hingga tahap evaluasinya, sehingga pada akhirnya penulis akan mendapatkan suatu kesimpulan yang cukup jelas untuk kemudian memberikan suatu rekomendasi apakah kebijakan ini efektif atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah.

Program keluarga harapan diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan. Dasar Hukum, UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementrian Sosial. Rumah Tangga Sasaran yang pasti merasakan beban yang berat. Tujuan dari Program PKH dalam rangka kompensasi pengurangan beban biaya sekolah anak:

- 1) Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya;
- 2) Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi;
- 3) Meningkatkan tanggung jawab sosial Bersama.

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul penelitian	Hasil penelitian
1.	“Dharmesti Wulandari dan Mayling Oey Gardiner (2013	Analisis Ketepatan Sasaran Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Berdasarkan Karakteristik Perumahan dan Demografis Rumah Tangga	penelitian ini menunjukkan Evaluasi ketepatan sasaran Program Keluarga Harapan. Targeting dari Program Keluarga Harapan belum sepenuhnya tepat sasaran atau masih terdapat ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan program. Masih terdapat jumlah dan nilai exclusivity dan inclusivity yang besar. PKH belum berhasil mencapai perfect targeting yang mana penerima PKH adalah rumah tangga miskin yang mempunyai kesejahteraan terendah
2.	Rahasia Meyssel	Efektivitas Ketepatan	penelitian menunjukkan asil

	Anneke, dkk (2017)	Sasaran Dalam Penyaluran Pkh Keluarga Petani Kelurahan Meras Kecamatan Bunaken Kota Manado	penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran PKH di Kelurahan Meras sudah berjalan dengan baik, penerima bantuan 8 melaksanakan kewajiban sesuai yang ditetapkan Dinas Sosial yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Setelah ada PKH anak
			lebih rajin bersekolah, dibidang kesehatan telah berjalan dengan baik anak usia 0-6 tahun, ibu hamil dan ibu nifas memiliki jaminan mendapat asupan gizi yang cukup melalui pemeriksaan, pemberian vitamin, imunisasi, serta penimbangan berat badan secara rutin di puskesmas yang ada di Kelurahan Tongkain
3.	Angga Gusti Putra (2021)	Analisis Efektivitas Ketepatan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Dikala Masa Pandemi Covid19	penelitian menunjukkan Hasil analisis menunjukkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak berpengaruh terhadap Ketepatan Keluarga Penerima Manfaat. Sedangkan Program Keluarga Harapan (PKH)

			<p>berpengaruh positif terhadap Ketepatan 9 Keluarga Penerima Manfaat antar Kecamatan di Kabupaten Wonosobo.</p>
4.	<p>“Lini dan Wahyu Subadi (2021</p>	<p>Efektivitas Bantuan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Puain Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas bantuan program keluarga harapan (PKH) di Desa Puain Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dikategorikan cukup efektif (57,3%). Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam efektivitas bantuan program keluarga harapan (PKH) di Desa Puain Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong yaitu (1) kurangnya pemahaman keluarga penerima manfaat (KPM) tentang bantuan program keluarga harapan (PKH) (2) bantuan yang tidak tepat sasaran terhadap keluarga yang mampu.”</p>

2.3 Teori Evaluasi program

Program dapat diartikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. dengan demikian yang perlu ditekankan bahwa program terdapat 3 unsur penting yaitu sebagai berikut:

1. Program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan.
2. Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan.
3. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Ralp Tyler, mendefinisikan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi. sedangkan *Cronbach* dan *stufflebeam* menjelaskan evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. sedangkan *Suharsmi arikunto* (2004:14) menjelaskan bahwa evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas, atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang di observasi dengan menggunakan standard tertentu yang telah di bakukan.

Tujuan daripada evaluasi program adalah untuk dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil,, kemajuan dan kendala yang dijumpai dari pelaksanaan program dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang. lebih lanjut bahwa dimensi utama dari evaluasi program diarahkan pada hasil manfaat, dan dampak dari program. pada prinsipnya yang perlu dibuat perangkat

evaluasi yang dapat diukur melalui empat dimensi yaitu sebagai berikut:

- a. Evaluasi pada tahap perencanaan (*EX-ANTE*). pada tahap perencanaan, evaluasi sering digunakan untuk menilai dan menentukan prioritas dari berbagai alternative dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- b. Evaluasi pada tahap pelaksanaan (*ON-GOING*). pada tahap pelaksanaan evaluasi digunakan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan program dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
- c. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan (*EX-POST*). pada tahap pasca pelaksanaan evaluasi ini diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini dilakukan setelah program berakhir untuk menilai relevansi (dampak dibandingkan masukan) efektivitas (hasil dibandingkan keluaran) kemanfaatan (hasil dibandingkan dibandingkan hasil) dan keberlanjutan (dampak dibandingkan dengan hasil dan keluaran) dari suatu program. hubungan ketiga tahapan tersebut sangat erat. selanjutnya terdapat perbedaan metodologi antara evaluasi program yang berfokus kerangka anggaran dengan yang berfokus pada kerangka regulasi. Evaluasi program yang berfokus pada anggaran dilakukan dengan dua cara yaitu: penilaian indikator kinerja program berdasarkan keluaran dan hasil dan studi evaluasi program berdasarkan dampak yang timbul. cara pertama dilakukan melalui perbandingan indikator kinerja sasaran yang direncanakan dengan realisasi, informasi yang relevan dan cukup harus

tersedia dengan mudah sebelum suatu indikator kinerja program dianggap layak. cara yang kedua dilaksanakan melalui pengumpulan data dan informasi yang bersifat lebih mendalam (*in-depth evaluation*) terhadap hasil, manfaat dan dampak dari program yang telah selesai dilaksanakan.

Adapun teori yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kebijakan keluarga harapan (PKH) Kec. Banggae Timur Kab. Majene “*Model evaluasi context, input, process, dan product*”. Oleh *Daniel Stufflebeam* pada tahun 1966. Model evaluasi CIPP mulai dikembangkan oleh *Daniel Stufflebeam* pada tahun 1966. *Stufflebeam* mendefinisikan evaluasi sebagai proses melukiskan (*delineating*), memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif-alternatif pengambilan keputusan. Melukiskan artinya menspesifikasi, mendefinisikan, dan menjelaskan untuk memfokuskan informasi yang diperlukan oleh para pengambil keputusan.

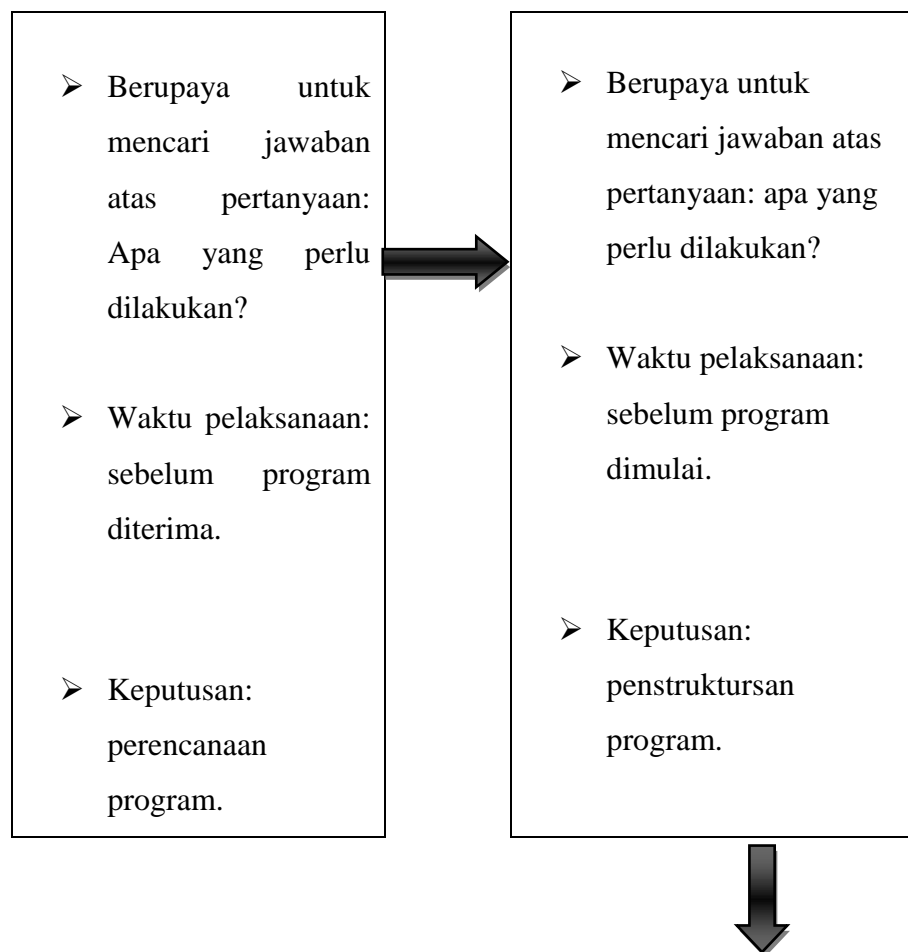
Memperoleh artinya dengan memakai pengukuran dan statistik untuk mengumpulkan, mengorganisasi dan menganalisis informasi. Menyediakan artinya mensintesis informasi sehingga akan melayani dengan baik kebutuhan evaluasi para pemangku kepentingan evaluasi. *Stufflebeam* menyatakan model evaluasi CIPP merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap objek program, proyek personalia, produk, instansi, dan system. Model ini dikonfigurasi untuk dipakai oleh evaluator internal yang dilakukan oleh organisasi evaluator, evaluasi diri yang dilakukan oleh tim proyek, atau penyedia layanan individual yang dikontrak atau evaluator eksternal.

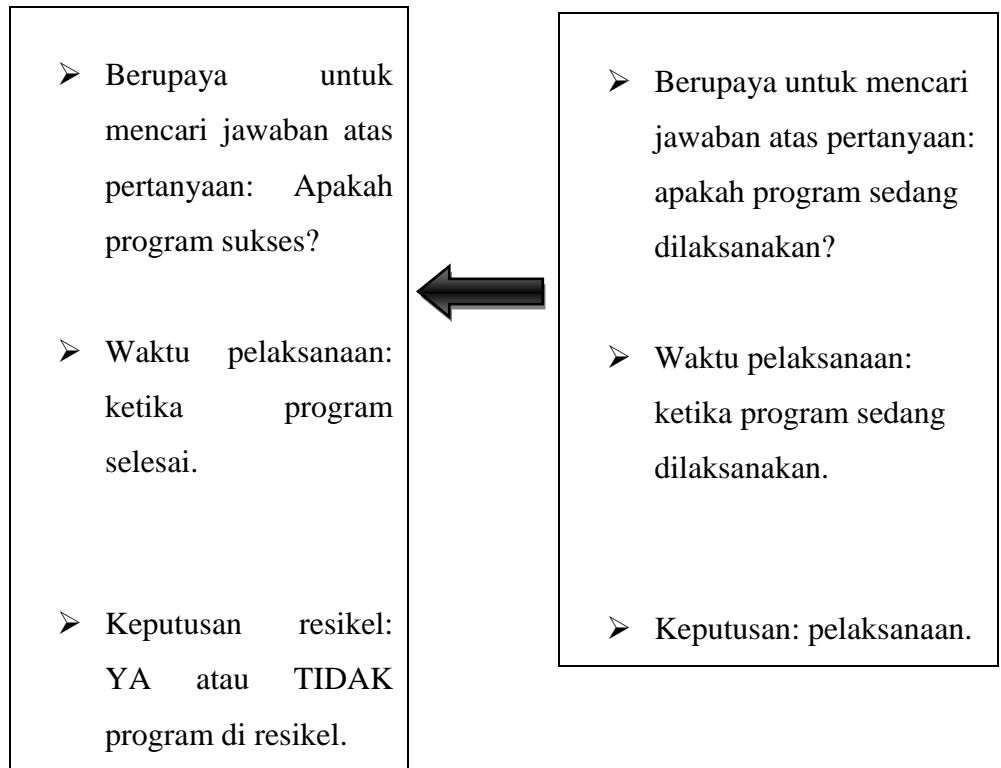
Model evaluasi *Context, Input, Procces, dan product (CIPP)* oleh *daniel stefflebeam* dipakai secara meluas diseluruh dunia dan dipakai untuk mengevaluasi berbagai disiplin dan layanan misalnya Pendidikan,

perumahan, Model CIPP terdiri dari empat jenis evaluasi yaitu:

- Evaluasi masukan (Input Evaluation)
- Evaluasi konteks (Context Evaluation)
- Evaluasi proses (Process Evaluation)
- Evaluasi produk (Product Evaluation)

Yang dilukiskan pada tabel:





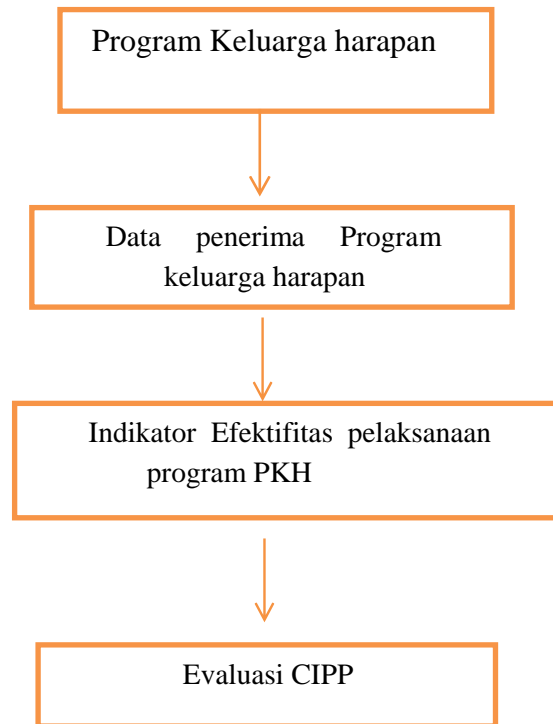
- *Evaluasi konteks.* menurut Daniel stufflebeam evaluasi konteks untuk menjawab pertanyaan: apa yang perlu dilakukan? (*what needs to be done?*) evaluasi ini mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program.
- *Evaluasi masukan.* Evaluasi masukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan: apa yang harus dilakukan? (*what should be done?*) evaluasi ini mengidentifikasi problem, asset, dan peluang untuk membantu para pengambil keputusan mendefinisikan tujuan, prioritas, dan manfaat-manfaat dari program, menilai pendekatan alternative, rencana tindakan, rencana staf, dan anggaran untuk feasibility dan potensi *cost effectiveness* untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ditargetkan. Para pengambil keputusan memakai evaluasi masukan dalam memilih diantara rencana-rencana yang ada, menyusun proposal pendanaan, alokasi sumber-sumber, menempatkan staf, menskedul pekerjaan, menilai rencana-rencana aktivitas dan penganggaran.
- *Evaluasi proses.* Evaluasi proses berupaya untuk mencari jawaban atas

pertanyaan: Apakah program sedang dilaksanakan? (*is it being done?*) Evaluasi ini berupaya mengakses pelaksanaan dari rencana untuk membantu staf program melaksanakan aktivitas dan kemudian membantu kelompok pemangku kebijakan yang lebih luas menilai program dan menginterpretasikan manfaat.

- *Evaluasi produk.* Evaluasi produk diarahkan untuk mencari jawaban pertanyaan: *did it succeed?* Evaluasi ini berupaya mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, baik jangka pendek maupun jangka Panjang. Keduanya untuk membantu staf menjaga upaya memfokuskan pada mencapai manfaat yang penting dan akhirnya untuk membantu kelompok-kelompok pemakai lebih luas mengukur kesuksesan upaya dalam mencapai kebutuhan-kebutuhan yang ditargetkan.

Menurut Stufflebeam, Model evaluasi CIPP bersifat linear, Artinya, evaluasi input harus didahului evaluasi context: sesungguhnya demikian menurut Stufflebeam dalam model evaluasi CIPP juga dikenal evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Dalam evaluasi formatif CIPP berupaya mencari pertanyaan atas: Apa yang perlu dilakukan? Bagaimana melakukannya? Apakah hal tersebut sedang dilakukan? Bagaimana melakukannya? Apakah hal tersebut sedang dilakukan? Apakah berhasil? Evaluator subunit memberikan informasi mengenai temuan kepada para pemangku kepentingan: membantu mengarahkan pengambilan keputusan, dan memperkuat kerja staf, ketika evaluasi formatif dilaksanakan dapat dilakukan penyesuaian dan pengembangan jika yang direncanakan tidak dilaksanakan dengan baik.

2.4 Kerangka Pikir



Program keluarga harapan

Program keluarga harapan atau disebut juga PKH adalah program bantuan social bersyarat bagi keluarga miskin yang telah ditetapkan sebagai penerima program keluarga harapan (PKH). Sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH dengan tujuan untuk mempercepat proses penentasan kemiskinan. Program perlindungan social yang juga dikenal sebagai *conditional cash transfer* (CCT) ini di dunia internasional terbukti sangat efektif dalam memerangi kemiskinan disemua negara. Landasan hukum pemberian PKH adalah:

1. Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang system jaminan social nasional.
2. Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.
3. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan dan jua penanggulangan kemiskinan.
4. Inpres nomor 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang penyempurnaan pelaksanaan program keluarga harapan.
5. Inpres nomor 1 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi poin lampiran ke 46 tentang pelaksanaan transparansi penyaluran bantuan langsung tunai bersyarat bagi keluarga sangat miskin (KSM) sebagai peserta program keluarga harapan.
6. Permensos no 28 tahun 2017 tentang pedoman umum verivikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
7. Permensos no 5 tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan social.

Adapun tujuan daripada kebijakan program keluarga harapan (PKH) adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target millenium development goals (MDGs). Selain hal tersebut, masih terdapat beberapa tujuan lain dari PKH terbagi dua yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan khusus PKH yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas kesehatan RTSM/KSM
- 2) Meningkatkan taraf Pendidikan anak-anak RTSM/KSM
- 3) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM/KSM.

Sedangkan hal yang menjadi tujuan umum dari program keluarga harapan ialah: meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku peserta PKH yang relative kurang mendukung peningkatan kesejahteraan social.

Data penerima program keluarga harapan

Dalam tata kelola pemerintahan pada setiap program kebijakan berbasis kesejahteraan sosial data merupakan sumber acuan pelaksanaan program, bukan sekedar mengukur jumlah semata. Berikut ini peneliti menyajikan data penerima program keluarga harapan tahap I tahun 2022 Kab. Majene Kec. Banggae timur menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Soisal RI.

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Penerima Manfaat PKH
1	Kelurahan Baruga	151
2	Kelurahan Baruga Dhua	131

3	Kelurahan Baurung	306
4	Kelurahan Labuang	236
5	Kelurahan Lembang	285
6	Kelurahan Tande	124
7	Kelurahan Tande Timur	101
8	Kelurahan Labuang Utara	169
9	Desa Buttu Baruga	85
TOTAL		1.588 Orang

Sumber data: operator DTKS DINSOS Kab.Majene

Indikator efektifitas pelaksanaan PKH

Efektifitas program keluarga harapan (PKH) dapat diukur dengan membandingkan rencana awal dengan tujuan program dengan hasil nyata yang diperoleh setelah pelaksanaan di masyarakat. Namun jika usaha dan tindakan tersebut tidak sesuai dengan tujuan, maka program tersebut dapat dinilai tidak efektif. Lebih lanjut, efektifitas program keluarga harapan dapat digambarkan sebagai ukuran keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia (pratiwi,2020). Efektifitas suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan dinilai dari kesesuaian antara tujuan dan hasil dari program yang dilaksanakan. Menurut *Makmur* efektifitas tersebut dapat dilihat berdasarkan kriteria sebagai berikut:

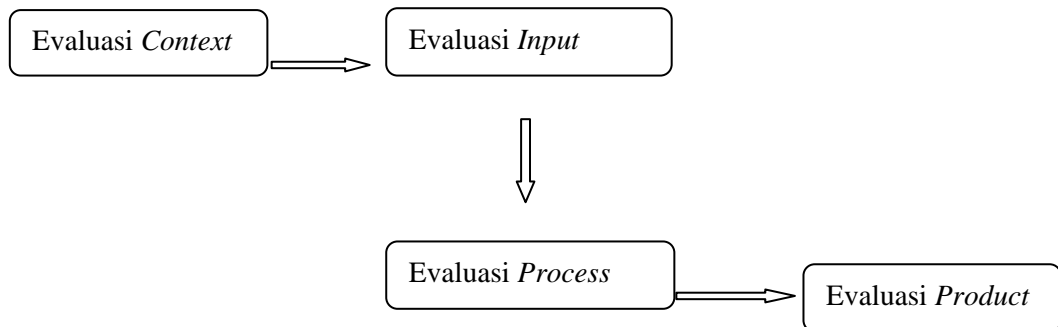
- a. Ketepatan sasaran, suatu program dianggap efektif jika memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai aturan.
- b. Ketepatan tujuan, ketepatan tujuan sangat penting dan akan mempengaruhi hasil akhir suatu program.
- c. Ketepatan biaya, menurut Makmur ketepatan biaya ini terkait dengan anggaran, ketepatan penggunaan biaya adalah penggunaan yang tidak kurang dan tidak lebih dari

yang diperlukan untuk melaksanakan operasi program dengan baik.

- d. Melahirkan perubahan dalam ruang lingkup masyarakat penerima program serta membawa peningkatan pada keadaan atau kondisi keberlangsungan hidup kearah yang lebih baik.

Evaluasi CIPP

Tujuan evaluasi program adalah agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang. Lebih lanjut bahwa dimensi utama evaluasi diarahkan kepada hasil, manfaat dan dampak dari program. Pada prinsipnya yang perlu dibuat perangkat evaluasi yang dapat diukur melalui empat dimensi menurut *Daniel stufflebeam* yaitu:



- a. *Evaluasi konteks.* menurut *Daniel stufflebeam* evaluasi konteks untu menjawab pertanyaan: apa yang perlu dilakukan? (*what needs to be done?*) evaluasi ini mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program.¹ Dalam pendekatan ini sebagaimana *program keluarga harapan* yang sedang berlangsung khususnya di Kec. Banggae timur telah memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang menjadi landasan disusunnya *program keluarga harapan* (PKH) jika tidak apa yang perlu dilakukan?
- b. *Evaluasi masukan.* Evaluasi masukan untuk mencari jawaban atas

¹ Muh, Firyal, Akbar, & Widya, Kurniati Mohi., *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi*

pertanyaan: apa yang harus dilakukan? (*what should be done?*) evaluasi ini mengidentifikasi problem, asset, dan peluang untuk membantu para pengambil keputusan mendefinisikan tujuan, prioritas, dan manfaat-manfaat dari program, menilai pendekatan alternative, rencana tindakan, rencana staf, dan anggaran untuk feasibilitas dan potensi *cost effectiveness* untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ditargetkan. Para pengambil keputusan memakai evaluasi masukan dalam memilih diantara rencana-rencana yang ada, menyusun proposal pendanaan, alokasi sumber-sumber, menempatkan staf, menskedul pekerjaan, menilai rencana-rencana aktivitas dan penganggaran.² Dalam masa berlangsungnya *program keluarga harapan* (PKH) di Kec. Banggae Timur Kab. Majene tentu ada beberapa masukan dari berbagai kalangan dalam implementasi program tersebut baik dalam bentuk kritikan, keluhan atau harapan dari masyarakat.

- c. *Evaluasi proses*. Evaluasi proses berupaya untuk mencari jawaban atas pertanyaan: Apakah program sedang dilaksanakan? (*is it being done?*) Evaluasi ini berupaya mengakses pelaksanaan dari rencana untuk membantu staf program melaksanakan aktivitas dan kemudian membantu kelompok pemangku kebijakan yang lebih luas menilai program dan menginterpretasikan manfaat.³
- d. *Evaluasi produk*. Evaluasi produk diarahkan untuk mencari jawaban pertanyaan: *did it succeed?* Evaluasi ini berupaya mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, baik jangka pendek maupun jangka Panjang. Keduanya untuk membantu staf menjaga upaya memfokuskan pada mencapai manfaat yang penting dan akhirnya untuk membantu kelompok-kelompok pemakai lebih luas mengukur kesuksesan upaya dalam mencapai kebutuhan-kebutuhan yang ditargetkan.⁴ Seperti yang

² *Ibid* hlm.62

³ *Ibid*, hlm. 62-63

⁴ *Ibid*, hlm. 63

dijelaskan sebelumnya oleh penulis sebagai *hipotesis* terkait *program keluarga harapan* (PKH) sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan social oleh pemerintah dipandang perlu untuk di evaluasi dan di identifikasi apakah data penerima program bantuan social (PKH) tersebut sudah tepat sasaran dan berhasil sesuai landasan program yang sudah ditetapkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang tujuan utamanya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan pemahaman yang lengkap untuk menggambarkan keadaan yang akan diteliti. Maka peneliti yang berperan sebagai instrument guna mendapatkan data yang diperlukan.

Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Kriyantono menyatakan bahwa, “riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya”. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, maka peneliti memilih Kabupaten Majene Kecamatan Banggae Timur Dan waktu penelitian ini akan berlangsung pada bulan maret sampai dengan mei 2023.

3.3.Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar atau data yang tidak dapat di ukur nilainya secara langsung yang dinyatakan dalam bentuk tanggapan atau pertanyaan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian sepenuhnya merupakan data kualitatif bentuk kalimat. Menurut penjelasan diatas, maka data kualitatif adalah jenis data yang berupa kalimat atau pendapat dari responden.

b. Sumber Data

Sumber data yaitu subyek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari responden atau obyek yang diteliti melalui wawancara kepada masyarakat Kec. Banggae timur yang menerima bantuan PKH.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang didapatkan peneliti secara tidak langsung atau data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder biasanya didapatkan di tempat kumpulan informasi. Seperti perpustakaan, perkantoran, pusat statistik, kantor-kantor pemerintah dan Sebagainya.

3.4.Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang didapatkan dari lapangan, adapun teknik yang digunakan penulis yaitu wawancara, observasi, dokumentasi

1. Wawancara

Wawancara ialah ialah serangkaian tanya jawab secara lisan dan diskusi langsung dengan pihak terkait. Wawancara dilakukan dengan menggunakan dua metode wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara dilakukan dengan interaktif langsung dengan informan 20 yang telah dipilih. Wawancara tersebut akan direkam melalui dicatat secara manual. Adapun daftar yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Table daftar nama-nama informan

No	Nama	Pekerjaan	Alamat
1	Hj. Andi Bada ,S,Sos., M.Amd,Pemb	Plt. Kepala dinas kabupaten Majene	Kelurahan lembang
2	Ahmad Hirman	Koordinator pendamping PKH	Lingkungan Lipu
3	Aco Mursalim, S.Sos	Kbd Perlindungan dan jaminan Sosial	Desa Bonde Kec.Pamboang
4	Dewianti	Pendamping PKH Kec. Banggae timur	BTN AL-IKHLAS LEPPE
5	Supiati	Operator DTKS DINSOS Majene	Lembang
6	Irna sari	Penjahit	Lembang
7	Sitti Aman	Ibu Rumah Tangga	Buttu baruga
8	Badaria	Petani	Baruga
9	Nurbaeti	Wiraswasta	Baurung
10	Samrah	Ibu rumah tangga	Labuang utara
11	Abd.karim kaco	Buruh tani/perkebunan	Labuang

12	Rosmini	Ibu rumah tangga	Labuang
13	Maryam	Ibu rumah tangga	Tande timur
14	Saenab	Ibu rumah tangga	Tande
15	Sajarah	Ibu rumah tangga	Lembang
16	Sahawiah	Pedagang	Baurung
17	Junaus	Ibu rumah tangga	Simullu
18	Hulamia	Ibu rumah tangga	Baruga
19	Ummi	Ibu rumah tangga	Baruga
20	Usman	Wiraswasta	Baruga barat
21	Hasra	Penjual sembako	Lembang

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung di lokasi penelitian guna mengetahui keadaan yang berlangsung atau memperlihatkan kebenaran dari sebuah penelitian yang sedang dilakukan. Dan penulis sebelumnya telah melakukan observasi awal terkait judul yang akan diteliti melalui program PEJUANG MUDA yang diselenggarakan oleh KEMENTERIAN SOSIAL RI pada tahun 2021. Melalui program tersebut kami ditugaskan untuk melakukan VERIVALI DATA penerima bantuan social PKH di kec. Banggae timur kab. Majene.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan secara pengambilan gambar di lapangan dimaksudkan untuk memperoleh jumlah data yang dapat membantu penelitian.

3.5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu proses mencari makna dari sekumpulan data sehingga dapat dituangkan dalam pembahasan temuan penelitian. Dengan kata lain, proses tersebut digunakan untuk memahami, menganalisis dan mengungkapkan fenomena dari suatu kejadian dan mencari jawaban atas pertanyaan- pertanyaan penelitian. Moloeng (2010:248) mengatakan bahwa menganalisis data kualitatif cenderung sulit untuk dilakukan karena memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual tinggi, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahkannya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan

Untuk mengelola data yang telah didapatkan dalam beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi yaitu:

a. Redukasi Data

Pada tahap ini dilakukan proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan pengabstraksian data dari transkrip wawancara, proses ini berlangsung sepanjang penelitian yang dilakukan sekitar sebulan yang lalu dimulai dengan membuat kategorisasi, memusatkan tema dan menentukan batas-batas permasalahan.

b. Penyajian Data

Selanjutnya kedua dari analisis data yaitu penyajian data dengan tujuan mendeskripsikan data secara singkat yang diperoleh melalui informan yang menguraikan. Bentuk penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian-penyajian ini, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi

c. Penarikan Kesimpulan.

Pengumpulan data di awal penelitian, peneliti sudah mencoba

memahami apa arti dari berbagai hal yang ia temui dengan mulai melakukan pencatatan pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab-akibat dan berbagai proposisi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Studi evaluasi kebijakan-kebijakan di Indonesia *penulis* Muh. Firyal Akbar,S.IP,M.SI dan Widya Kurniati Moh,S.IP,M.SI

Kementrian Sosial Republik Indonesia.(2019): *Buku pedoman keluarga harapan*

Kementrian Sosial Republik Indonesia (2015): *pedoman umum program keluarga harapan*

Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, Bandung: Refika Aditama, 2012

Santoso,Djonet. (2018).*penduduk miskin transiaent: masalah kemiskinan yang terabaikan.*

Khomsan Ali, Hadi Arya, Saharuddin dkk.(2015). *Indicator kemiskinan dan misklasifikasi orang miskin.*

SuwitriSri. *Konsep dasar kebijakan public.* Modul 1-MAPU5301-M1

Subarsono.(2005) *Analisis kebijakan public*

Silalahi, Ulber. (2009) *Metode Penelitian Sosial.*

B. E-BOOK

Anneke, Rahasia.,dkk. 2017. Efektivitas Ketepatan Sasaran Dalam Penyaluran Pkh Keluarga Petani Kelurahan Meras Kecamatan Bunaken Kota Manado. *Agri-SosioEkonomi Unsrat* .Volume 13 Nomor 3

Astari, Urika Tri dan Argo Pambudi. 2018. Efektivitas Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Pandak Bantul. *Jurnal E-Journal Jurusan Ilmu Administrasi Negara.*

Badan Pusat statistik. 2020. *Berita Resmi Statistik 2020*

Bangin Burhan.2007. *Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

Iping, B. (2020). Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2)

Kementrian Sosial RI, 2007. *Pedoman Umum PKH.* Penerbit UPPKH Pusat. Jakarta.
Kementrian Sosial RI, Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga harapan (PKH), (Direktorat

Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2016),

Kementerian Sosial. 2020. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*.

Kementerian Sosial. 2020. *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020*

Najidah, Nurul dan Hesti Lestari. 2018. “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang”. *Jurnal Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*.

Oktavia, L., Khairiyah, F., & Iman, M. A. Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 97-110.

Syafruddin, Iqbal, M., & Kalrah, A. (2021). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 9(2), 104–110

Totok Madikanto dan Poerwoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.

Usman, 2014. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan. Studi di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik*.

Widianto, Bambang. (2010). *Pelaksanaan Dan Usulan Penyempurnaan Program Pro-Rakyat. Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat. Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia*

Wulandari, Dharmesti. 2013 Analisis Ketepatan Sasaran Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Berdasarkan Karakteristik Perumahan dan Demografis Rumah Tangga. *Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.*